

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Angel, & Nasution, M. (2023). Kolaborasi Pemerintah dengan Stakeholders dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan. *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 69-76.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543-571.
- Araujo, C. M., Astuti, W., & Yudana, G. (2023). Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 5, 155–169. <http://jurnal.uns.ac.id/jdk>
- Avelar, S., Zah, R., & Tavares-Corrêa, C. (2009). Linking socioeconomic classes and land cover data in Lima, Peru: Assessment through the application of remote sensing and GIS. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 11(1), 27–37.
- Badan Pusat Statistika Kota Surakarta. (2023). <https://surakartakota.bps.go.id/id>
- BPK. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. (2023). *Paparan Penataan Kumuh Kota Surakarta Tahun 2023*.
- Doxiadis, C. A. (1970). Ekistics: the science of human settlements. *Architect and Urban Planner*, 170(3956), 393–404.
- Fahirah, F., dkk. (2010). Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Nilai Jual Lahan dan Bangunan pada Perumahan Tipe Sederhana. *Jurnal Smartek*, 8, 251–269.
- Hardani, Andriani, H., & Ustiawaty, J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st ed.). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. In *Jejaring Administrasi Publik*, Th IV (1), 47-53.
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212-221. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>
- Huda, A. S., Nuzullani, I., Maulidah, S. A., Kusuma, R. W., & Kurniawan, I. A. (2023). Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun 1969-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 115–128.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Profil Penataan Kawasan Permukiman Semanggi Utara (RW 2, 3, 4, 5 Semanggi) Kota Surakarta*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Surat Edaran Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*.
- Kriyantono, R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Mangeswuri, D. R. (2016). Kebijakan Pembiayaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 83–95.
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), 82–98.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (M. R. Firdaus & Z. Yopiannor, Eds.; 1st ed.). Bildung.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2016). *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2013). *Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2013*.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2011). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011-2031*.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2016). *SK Walikota Nomor 413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta*.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2020). *SK Walikota Surakarta No. 640/69.9 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta*.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2019). *Laporan Akhir Penyusunan Siteplan RW 2, RW 3, RW 4, RW 5 Semanggi Kota Surakarta Tahun 2019*.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*.
- Rositasari, R., Wahyuni, A., & Mulyadi, E. (2022). Kolaborasi Stakeholder dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 2022–2376.

- Rosyada, N. D., Hardiana, A., & Rahayu, P. (2021). Faktor Prioritas dalam Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai (Studi kasus: Kali Pepe, Kota Surakarta). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(1), 45-57.
- Rosyida, G. (2017). *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Skripsi Program S-1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret.
- Sabaruddin, A. S., & Said, A. L. (2018). Collaborative Governance In Household Handling. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(11), 338–344.
- Salsabila, F. (2022). *Peran Aktor-aktor dalam Komunikasi Partisipatif Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta*. Skripsi Program S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret.
- Septiani, E., Muhammadiyah, & Mappaming. (2020). Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Utara. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(1), 1–6.
- Sufianti, E. (2014). Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(1), 77–95.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Kota Bandung*, 1-23.
- Sunarti, S., Yuliasuti, N., & Indriastjario, I. (2018). Kolaborasi Stakeholder dalam Penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Salatiga. *TATALOKA*, 20(4), 455-471. <https://doi.org/10.14710/tataloka.20.4.455-471>
- Susilowati, D. T., Rochwulaningsih, Y., & Rinardi, H. (2020). The Implementation of the Kampung Improvement Program in Semarang: Some Obstacles and Impacts. *Indonesian Historical Studies*, 4(2), 170–185. <https://doi.org/10.14710/ihis.v4i2.8951>
- Wardhana, N. H., & Sulistyarso, H. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan di kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 4(2), 150–154.
- Widyanata, R. (2018). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Skripsi Program S-1 Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research Design and Methods*. Sage Publication.